

Judul : Tambahan anggaran Kemenkum, komisi XIII minta usulan dikaji ulang
Tanggal : Jumat, 12 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tambahan Anggaran Kemenkum Komisi XIII Minta Usulan Dikaji Ulang



Sugiat Santoso

WAKIL Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menyoroti usulan tambahan anggaran Kementerian Hukum (Kemenkum) 2027 yang lebih berat porsi-porsinya pada kebutuhan internal ketimbang layanan bantuan hukum masyarakat. Struktur anggaran itu harus dikaji ulang agar berpihak pada rakyat dan sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto.

Sugiat menjelaskan, dari total usulan tambahan Rp 837 miliar, porsi terbesar justru diarahkan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana internal kementerian. Sementara anggaran bantuan hukum bagi masyarakat masih sangat kecil, hanya sekitar Rp 35 miliar. Komposisi itu memunculkan pertanyaan soal rasa keadilan dalam penyusunan anggaran.

Kata dia, sekitar Rp 750 miliar dari usulan itu untuk pembangunan fisik internal yang membuat semangat efisiensi jadi kurang terlihat. "Anggarannya tampak lebih banyak untuk pembinaan kantor," katanya dalam Raker Komisi XIII dengan Kemenkum di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Sugiat, banyak aset dan gedung yang dulu dipakai Kementerian Hukum dan HAM masih dikuasai Kementerian Hu-

kum. Karena itu, pembangunan sektor hukum semestinya lebih menitikberatkan pada penguatan substansi dan pelayanan kepada masyarakat, bukan pembangunan fisik semata.

"Para pendiri bangsa kita juga ingin pembangunan ruh didahulukan, baru kemudian pembangunan fisik menyusul sebagai penopang kuat untuk masa depan," ujarnya.

Dia berharap, Kemenkum bisa menyusun ulang struktur usulan anggarannya agar lebih berpihak pada pemenuhan akses keadilan masyarakat, termasuk lewat penguatan program bantuan hukum. Akses masyarakat terhadap bantuan hukum masih jadi persoalan serius karena saat ini hal itu belum mendapat perhatian memadai dari negara.

Sugiat mengingatkan, kepercayaan publik terhadap negara sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah menghadirkan keadilan yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. "Kalau rakyat tidak percaya lagi kepada negara untuk mendapat keadilan hukum, itu jadi tanda yang harus diwaspadai," ucapnya.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menambahkan, semangat efisiensi yang diarahkan Presiden Prabowo perlu diwujudkan lewat program yang terukur dan berorientasi pada penguatan sumber daya manusia. Efisiensi bukan cuma soal pengelolaan anggaran, tapi juga keberanian menentukan prioritas agar manfaatnya terasa nyata.

Menurut Willy, salah satu arti efisiensi adalah memastikan tiap program punya fokus yang jelas dan tidak terlalu melebar sehingga hasilnya sulit diukur. Pemerintah perlu menentukan prioritas supaya pelaksanaan program lebih efektif. "Sehingga dampaknya bagi masyarakat di lapangan akan lebih optimal," ujarnya. ■ PYB